



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 846/I/2015

II/JANUARI 2015



INFRASTRUKTUR PERBATASAN JADI PRIORITAS PEMBANGUNAN

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

INFRASTRUKTUR PERBATASAN JADI PRIORITAS PEMBANGUNAN



Ketua DPR RI Setya Novanto saat memberikan Keterangan Pers di Istana Negara

Percepatan pembangunan infrastruktur terutama di daerah perbatasan jadi prioritas pembangunan ke depan. Daerah perbatasan harus menjadi beranda negara, bukan malah menjadi halaman belakang dari negara.

Inilah yang mengemuka dalam pertemuan para pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Rabu (14/1). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPR RI Setya Novanto, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MA Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial (KY)

Suparman Marzuki, dan Ketua DPD Irian Gusman.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai tuan rumah menggelar pertemuan di Istana Negara dengan para pemimpin lembaga negara untuk menyampaikan program pembangunan prioritas. Ketua DPR Setya Novanto usai pertemuan, mengungkapkan, Presiden menyampaikan program percepatan pembangunan yang sedang diprioritaskan saat ini, yaitu infrastruktur daerah, perhubungan, dan pertanian.

“Ini undangan Presiden. Tadi kita membicarakan infrastruktur yang berkaitan dengan prioritas, khususnya yang berkaitan dengan perbatasan, juga masalah perhubungan dan pertanian. Pertemuan seperti ini akan kita adakan dua bulan sekali dengan Bapak Presiden dan lembaga negara lainnya,” ujar Novanto.

Pertemuan di awal tahun ini, sambung Novanto, sangat baik dengan membicarakan program-program strategis untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang bersama Novanto ikut memberikan keterangan pers, menambahkan, pertemuan tersebut berlangsung dua jam lebih. Tema yang mengemuka dalam pertemuan pimpinan lembaga negara adalah percepatan pembangunan kesejahteraan.

Selain itu, sambung Zulkifli, pemerataan pembangunan agar tak terjadi ketimpangan, juga menjadi tema pembincangan. “Yang menarik tadi mempercepat pembangunan di daerah-daerah perbatasan agar perbatasan tidak di halaman belakang, tapi halaman muka. Kemudian infrastruktur juga sangat penting untuk diprioritaskan. Zulkifli mengapresiasi langkah Presiden di awal tahun ini dengan memberi prioritas pembangunan. (mh), foto : andri/parle/hr.

Ibas Nilai Tidak Ada Urgensi Penggantian Kapolri

Anggota DPR RI Komisi X, Edhi Basoro Yudhoyono menilai pergantian Kapolri tidak ada urgensi yang sangat

mendesak, mengingat Kapolri saat ini Jenderal Sutarnam belum akan pensiun dalam waktu dekat. Hal tersebut

diungkapkan Ibas, begitu ia biasa disapa, sesaat sebelum berlangsungnya sidang Paripurna DPR RI, Kamis



Anggota Komisi X DPR, Edhi Baskoro Yudhoyono

(16/1) di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta.

“Kapolri Jenderal Sutarman saat

ini belum akan pensiun dalam waktu dekat, ia masih memiliki waktu yang cukup panjang. Sehingga tidak ada urgensi yang sangat mendesak untuk mempercepat pergantian Kapolri, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri, diberhentikan dan kecuali yang bersangkutan tersangkut masalah hukum lainnya,” ungkap Ibas.

Dilanjutkannya, jika Presiden tetap mengangkat Kapolri yang berstatus tersangka, tentu hal ini dapat menjadi sejarah kelam yang mencoreng negeri kita. Mengingat selama ini Indonesia tengah bersemangat melakukan pemberantasan korupsi dan menegakkan keadilan di negeri kita.

“Dengan pengangkatan Calon Ka-

polri yang berstatus tersangka akan menjadi citra buruk dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini meminta kepada DPR untuk memberikan waktu konsultasi kepada Presiden, Kopolnas, Polri dan KPK untuk menindaklanjuti kasus yang disangkakan KPK terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. Sekaligus memberikan kesempatan kepada Budi Gunawan mengajukan haknya untuk klarifikasi terhadap status yang disangkakan kepadanya, sebagaimana azas praduga tak bersalah. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/hr

Pemilihan Pimpinan KPK Pengganti Busjro Ditunda

DPR RI Sepakat bahwa proses pemilihan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Busjro Muqoddas ditunda dan akan dilakukan secara serentak bersamaan atau sekaligus dengan 4 Pimpinan KPK lainnya.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Kamis (15/1), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, saat menyampaikan laporan Komisi III mengenai pembahasan Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK menyebutkan bahwa Komisi yang membidangi hukum ini memandang penting mekanisme atau proses pemilihan yang baik, efektif, dan efisien dalam pemilihan Calon Pimpinan KPK. Sehingga diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang terbaik di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangkaian persiapan uji kelayakan terhadap calon pengganti Pimpinan KPK, Komisi III telah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para pakar dan ahli, serta mendengarkan saran masukan dari penegak hukum lainnya di daerah.

“Dalam rangka meminta saran dan masukan terhadap 2 orang Calon Pengganti Pimpinan KPK yang diusulkan Presiden dan dampak apabila Pimpinan KPK yang diusulkan tersebut digabungkan pemilihannya dengan Calon Pimpinan lainnya yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember tahun 2015, sehingga pemilihan dan penetapan dilakukan terhadap 5 calon pimpinan KPK secara bersamaan,” kata Aziz Syamsuddin.

Melalui interupsi, anggota dewan Benny K. Harman (fraksi PD) menegaskan di dalam rapat pengambilan keputusan di tingkat komisi telah mengajukan keberatan. F-PD menegaskan, ketentuan dalam Undang-Undang tentang KPK bahwa 5 pimpinan KPK wajib hukumnya dipenuhi (*mondatorium rule*). Artinya dengan sengaja pembuat UU KPK menegaskan bahwa 5 pimpinan KPK wajib hukumnya untuk dipenuhi dengan konsekuensi hukum.

“Apabila tidak dipenuhi 5 maka tidak boleh diambil kepu-



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin

tusan apapun oleh pimpinan KPK yang mempunyai konsekuensi hukum, akibatnya adalah keputusan-keputusan pimpinan KPK yang tidak dilakukan oleh 5 pimpinan KPK mempunyai akibat hukum, tidak sahnya putusan itu,” jelasnya.

Menurut Benny, itulah yang menjadi alasan pokok dilakukan pemilihan untuk memenuhi kewajiban adanya 5 pimpinan KPK itu. Jika keputusan ini diambil maka KPK sejak pimpinannya hanya 4 komisioner kehilangan legalitasnya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terutama tindakan hukum yang punya dampak represif.

“Ini kami ingatkan, dengan demikian sampai 10 bulan ini KPK bukan soal efektifitas 2 atau 4 pimpinan, tapi masalah penegakan hukum dan legalitas,” paparnya.

Oleh sebab itu, Fraksi Demokrat berpandangan tetap 5 pimpinan KPK maka harus pilih 1 dari 2 yang telah diajukan oleh Pemerintah. Apabila ini tidak dipenuhi maka yang akan terjadi adalah pandangan demokrat, 4 pimpinan KPK tidak

mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan langkah-langkah penindakan, kecuali langkah-langkah pencegahan. Ini akibatnya dan ini yang kami ingatkan seluruh anggota Dewan.

Tapi diakhir tanggapannya, Benny menegaskan kalau memang ini sudah menjadi keputusan, Fraksi Partai Demokrat tunduk kepada keputusan itu, hanya mengingatkan itulah resikonya. (as) foto: andri/parle/hr.

Pengangkatan Budi Gunawan Akan Coreng Sejarah Indonesia



Anggota Komisi III DPR Benny K Harman

Pengangkatan Komjen Budi Gunawan oleh Presiden Republik Indonesia akan mencoreng sejarah Republik ini. Karena untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri.

“Apabila Komjen Polisi Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri dengan status tersangka maka diyakini tidak akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Apalagi Polri juga dituntut untuk secara aktif menegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi,” tandas Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat menyampaikan interupsi dalam Sidang

Paripurna, Kamis (15/1).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Benny mengatakan, yang harus dilakukan Dewan saat ini adalah melakukan pendalaman klarifikasi atas dugaan keterlibatan Komjen Polisi Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi seperti yang diduga oleh KPK, baik kepada Presiden, KPK, Kapolri, Korpolda maupun kepada Komjen Polisi Budi Gunawan.

Sedangkan Kapolri yang menjabat saat ini, Jenderal Polisi Sutarmas masih tetap bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi atas kasus Komjen Polisi Budi Gunawan selesai. Disamping itu masa jabatan Jenderal Polisi Sutarmas belum selesai, yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, belum memasuki masa pensiun, tidak juga berhalangan tetap dan juga tidak dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Jika Presiden dan Dewan mengabaikan apa yang menjadi ketetapan KPK akan memiliki akibat yang kurang baik bagi kedua lembaga. Karena Lembaga utama di negara ini oleh rakyat akan dinilai tidak sungguh-sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi,” ucap Benny.

Fraksi PD lanjut dia, mendukung sepenuhnya pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun Fraksi PD sungguh-sungguh dikejutkan seperti adanya tsunami, seperti petir disiang bolong, tidak ada angin dan tidak ada hujan tiba-tiba diumumkan Komjen Polisi Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi. (spy) foto: iwan armanias/parle/hr

Usulan Pembangunan Dapil Disampaikan Dalam Rapat Paripurna



Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna

DPR RI memutuskan Anggota DPR dapat menyampaikan haknya untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan (Dapil) dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dari Anggota DPR RI, sebagaimana tertera dalam Tata tertib DPR RI Pasal 195 Ayat (1) bahwa Anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program

pembangunan daerah pemilihan.

“Dalam prinsipnya selama 1 menit diberikan kesempatan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna. Paling lambat 1 hari sebelum Rapat Paripurna disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI,” katanya, saat memimpin

Rapat Paripurna DPR, Kamis (15/1), di Gedung parlemen, Jakarta.

Sebagaimana telah disampaikan dalam forum lobby, dikatakan Taufik memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan Anggota DPR RI masih ada mekanisme, yang

diusulkan akan dibahas secara teknis lebih lanjut di dalam Rapat Badan Musyawarah DPR bekerja sama dengan Kesekjenan DPR RI. (as) foto: iwan armanias/parle/hr

Presiden Diharapkan Secepatnya Melantik Budi Gunawan

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai dan rapat paripurna menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka Presiden bisa secepatnya melantik. Presiden Jokowi harus menghormati keputusan politik yang diambil DPR dan seyogyanya melantik Budi Gunawan jadi Kapolri dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Bahkan saya usulkan, besok bisa dilantik sebagai Kapolri baru menggantikan Kapolri sekarang Jenderal Sutarmanto,” tandas Trimed panggilan akrab politisi PDI Perjuangan kepada pers sebelum rapat paripurna DPR Kamis (15/1).

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya tentu akan mengingatkan jika Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden, tidak boleh menggunakan institusi polri untuk mendukung persoalan hukum yang sedang dihadapi. “Itu juga harus kami kawal, dan kami ingatkan Budi untuk tidak menyeret-nyeret institusi polri,” tegasnya.

Saat ditanya, dengan pengangkatan Kapolri baru ini akan berpengaruh pada pemilu PDIP, kata Trimed tidak akan berpengaruh. Pasalnya pemberitaan yang muncul tidak sepenuhnya atau 100% menyalahkan posisi Presiden, DPR atau Budi Gunawan. Masalahnya sederhana, bahwa menurut laporan pada seleksi Kabinet mendapat rapor merah, tapi yang disayangkan, kenapa sudah masuk proses di DPR dimana Senin dibacakan rapat paripurna, kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka. Proses di DPR tidak bisa distop, dan kemudian masalahnya diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk mengatasinya.

Terkait rencana Simpatisan “Salam Dua Jari” yang mendesak Presiden untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri baru, Trimed mengatakan, Presiden mempunyai kemampuan untuk menjelaskan proses ini, dan tidak akan kehilangan dukungan simpatisan.

Sedangkan menyangkut komunikasi dengan KPK yang



Anggota DPR RI Trimedya Panjaitan (F PDI Perjuangan)

juga mitra kerja Komisi III, Trimed mengharapkan minggu depan dia minta Komisi III untuk memanggil KPK maupun kepolisian. Dengan demikian semuanya clear tidak ada syak wasangka bahwa KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka punya tendensi tertentu. Kemudian di polri juga punya tendensi tertentu dalam rangka menggagalkan pencalonan Budi Gunawan.

Dukungan DPR kepada Budi Gunawan, kata Trimed, karena hubungan baik dengan semua fraksi dan itu terlihat sejak menjadi ajudan Presiden Megawati, dan selalu mendampingi Kapolri dalam rapat-rapat di DPR. “Komunikasi cukup baik, dan saat pemaparan program pada uji kelayakan, anggota Dewan cukup terkesima. Bahkan ada teman Komisi III yang telah ikut empat kali proper test calon Kapolri, inilah pemaparan visi misi calon Kapolri yang cukup baik,” ujarnya dengan menambahkan, di intern Polri, Pak Budi Gunawan ini dikenal sebagai konseptor, bahwa ada kasus yang dihadapi itu soal lain. (mp)/foto:iwan armanias/parle/hr.

Mutasi Pegawai Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi

Mutasi atau rotasi pejabat merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Selain itu, untuk optimalisasi *supporting system* kepada Anggota Dewan. Demikian diungkapkan Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, saat melantik Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Setjen DPR.

“Mutasi dan promosi ini merupakan bagian dari reformasi

birokrasi yang sudah kita lakukan secara konsisten. Selain peanaan organisasi dan sumber daya manusia, ini juga karena adanya tuntutan. Kita di sini untuk memberikan *support* kepada Anggota Dewan. Dari awal pelantikan Anggota Dewan sampai hari ini, dinamika politik yang tinggi, mau tidak mau membawa dampak kepada dukungan Setjen DPR kepada Anggota Dewan,” kata Winantuningtyastiti, saat memberi-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, saat melantik Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Setjen DPR RI

kan sambutan, di Gedung Nusantara, Rabu (14/1) sore.

Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti juga mengingatkan kepada seluruh pejabat, baik Pimpinan Dewan maupun Anggota Dewan selalu mengamati kinerja dari Setjen DPR. Sehingga ini menjadi tantangan bagi seluruh pejabat maupun karyawan di lingkungan Setjen DPR untuk menyelaraskan langkah dengan Pimpinan dan Anggota Dewan.

“Ini tantangan kita. Mau tidak mau kita harus mengikuti langkah dari Anggota Dewan, yang saat ini seperti sedang berlari. Di berbagai aspek mekanisme kegiatan, kita terus memperbaiki. Dan dari kritikan dan saran Anggota Dewan, terus kita perhatikan. Sekarang kita dituntut untuk juga berlari. Tidak ada satupun pejabat di berbagai eselon yang dapat santai,” tegas Win.

Setiap pejabat, tambah Win, mempunyai karakteristik yang berbeda, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Sehingga, Setjen akan mencari dan menyesuaikan tempat untuk menduduki jabatan yang paling sesuai dengan kemampuan masing-masing pejabat.

“Sangat mungkin ke depannya, tuntutan akan berbeda pula. Nanti akan kita sesuaikan lagi, mau tidak mau kita harus lakukan terus menerus,” tambahnya.

Win juga kembali mengingatkan, mutasi atau promosi bukan merupakan hukuman, melainkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan. Kinerja pejabat Setjen DPR dituntut untuk cepat, tepat dan berkualitas. Sehingga, dimanapun seorang pejabat ditempatkan, disitulah pula harus bekerja secara maksimal.

“Untuk teman-teman yang disumpah dan dipercaya untuk menjabat jabatan baru atau jabatan yang lebih tinggi, saya ucapkan selamat. Kita sudah melakukan berbagai pertimbangan. Inilah kesepakatan yang terbaik,” tutup Win.

Untuk Pejabat Eselon II yang mengalami mutasi yaitu Satyanto Priambodo yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.

Disusul Pejabat Eselon III, yaitu Mitra Anindyarina yang menjabat Kabag Persidangan Paripurna. Kemudian Kabag TU Pimpinan Setjen yang dijabat oleh Tri Udiartiningrum. Robert Juheng Purba mendapatkan posisi sebagai Kabag Set Kerjasama Bilateral. Dan, Chairil Putra menjabat Kabag Set Organisasi Parlemen Regional.

Kemudian, Endah Tjahjani Dwirini menduduki jabatan Kabag Set Organisasi Parlemen Internasional. Kabag Protokol kini dijabat oleh Furcony Putri Syakura. Aris Subiakto menjabat Kabag Perumahan dan Wisma DPR. Dan, Muhammad Yus Iqbal menjabat sebagai Kabag Set Komisi IX.

Sementara, pada Pejabat Eselon IV, Kuswosari kini menjabat sebagai Kasubag Pengawasan Keuangan Bagian Wasnal. Eguh Setiawan menjadi Kasubag Organisasi, Bagian Organisasi dan Tatalaksana. Heny Widyaningsih menjabat Kasubag Rapat, Bagian Set Komisi X.

Dan yang terakhir, Nur Widayah mendapatkan jabatan baru sebagai Kasubag TU Tenaga Ahli Kelengkapan DPR dan Tenaga Ahli Fraksi Bagian TU Tenaga Ahli dan Asisten Anggota. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr

Komisi VII Terima Masukan dari Hiswana Migas



Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha dan Mulyadi saat berdialog dengan DPP Hiswana Migas

Komisi VII DPR RI yang membicarakan Energi dan Sumber Daya Mineral menerima masukan terkait kebijakan energi dari Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (DPP Hiswana Migas), Rabu (14/1/2014).

Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha yang memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII dengan Hiswana Migas menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan Hiswana Migas.

“Mohon diberikan masukan juga terhadap kebijakan pemerintah, dan mengenai cara-cara penghitungan biaya pokok produksi BBM sesuai

karakteristik yang akan memperkaya kita agar pada gilirannya nanti Komisi VII rapat dengan Pertamina dan kemudian dengan Menteri ESDM sudah bisa memberikan satu gambaran, jadi tidak berbicara untung rugi saja tetapi memberikan masukan secara komprehensif,” papar Satya di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi menyampaikan tentang Kemandirian dan Ketahanan Energi. Dimana kemandirian energi, menurutnya, minimal harus memenuhi tiga hal yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan daya beli.

Ketiga faktor ini harus saling mendukung terutama dalam hal produk dan infrastruktur. Dan SPBU merupakan infrastruktur bagian terdepan dari kemandirian energi. SPBU di Indonesia adalah milik pengusaha nasional dan investasinya menggunakan sumber daya nasional.

“BBM Diproduksi di kilang tapi tidak bisa disalurkan ke SPBU itu berarti aksesibilitasnya rendah. SPBU merupakan infrastruktur terdepan dari kemandirian energi,” ujar Eri.

“Hubungan kemandirian dan ketahanan energi adalah kemampuan untuk merespon perubahan energi global

dimana saat ini harga *crude* turun terus sampai ke dasar \$ 40 dan kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.

Dijelaskan Eri, jika energi tersedia tapi harganya tidak terjangkau maka masyarakat tidak dapat mengakses energi tersebut, dan jika harga terjangkau tapi tidak tersedia maka masyarakat tidak bisa memanfaatkan energi.

Eri juga menyampaikan keluhan apa yang terjadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan menurunkan harga BBM, dimana para pengusaha SPBU tidak mendapatkan kompensasi dari turunnya harga tersebut.

Selain itu, ada beberapa daerah seperti di Papua dimana pengusaha boleh menentukan harga sendiri dari harga yang ditentukan pemerintah.

Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut Eri mengusulkan beberapa hal antara lain, satu, pemberian *margin* usaha yang wajar dan fair kepada pengusaha migas hilir sebagai pengembangan usaha.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang cenderung ke arah liberalisasi bisnis hilir migas. Ketiga, adanya proteksi terhadap pengusaha hilir migas khususnya bisnis SPBU dan

LPG. Terakhir, keempat, mengusulkan revisi UU Migas harus mengakomodir kepentingan pengusaha nasional dan memihak kepada usaha kecil dan menengah di kegiatan usaha hilir migas.

Terhadap berbagai masukan dan usulan yang disampaikan Hiswana Migas tersebut mendapatkan kritikan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang hadir.

Ketua Komisi VII, Kardaya menegaskan Komisi VII ingin mendapatkan masukan yang *fair* dan wajar, serta usulan yang konkrit.

“Proteksi seperti apa yang diinginkan, apa isi dari revisi UU Migas. Mestinya kesempatan ini digunakan untuk menyampaikan apa yang bapak-bapak mintakan. Takutnya apa yang dimaksud DPR berbeda dengan yang dimaksudkan bapak-bapak dari Hiswana Migas,” tegas Kardaya.

Diakhir rapat, pimpinan rapat Satya Widya Yudha meminta DPP Hiswana Migas memberikan jawaban lengkap dan komprehensif berbagai pertanyaan Komisi VII DPR dan disampaikan ke Komisi VII pada tanggal 19 Januari 2015. (sc), foto : naefurodjie/parle/hr.

Komisi III Secara Aklamasi Setujui Komjen Budi Gunawan Jadi Kapolri

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komisar Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah Komisi III melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan atas calon tunggal Kepala Polri yang diajukan Presiden Joko Widodo.

“Menyetujui surat Presiden dan secara aklamasi mengangkat Komisar Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memberhentikan Jenderal (Pol)

Sutarman,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsudin, Rabu (14/1), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Azis mengatakan, keputusan tersebut akan dibawa dalam sidang paripurna yang rencananya akan digelar pada Kamis 15 Januari 2015 pukul 09.00 WIB. “Kami akan bawa dan laporkan putusan ini dalam rapat paripurna terdekat,” kata Azis. (as), foto : naefurodjie/parle/hr.



Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin

DPR dan BPK Miliki Hubungan Penting Dalam Penyelenggaraan Negara

Setiap hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, secara konstitusional, seluruhnya disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat sesuai dengan kewenangannya. Dimana salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan, yang menjadi bagian yang tidak ter-

pisahkan dengan pemeriksaan yang diamanahkan konstitusi kepada BPK.

Demikian dikatakan Ketua DPR Setya Novanto, saat menjadi narasum-

ber pada forum “BPK Mendengar”, yang diselenggarakan di Auditorium Kantor BPK, Jakarta, Rabu (14/01/15). Acara dibuka secara resmi oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis.

“Konstitusi menyebutkan dengan jelas betapa strategisnya hubungan antara BPK dengan DPR dikaitkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara. Konstitusi kita telah mengatur hubungan BPK dengan DPR dalam suatu hubungan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara,” jelas Novanto.

Politisi Golkar ini menambahkan, selama ini BPK telah banyak memberikan kontribusi kepada DPR dalam kerangka implementasi fungsi pengawasan terhadap penyelesaian pemerintah oleh presiden, melalui penyampaian hasil pemeriksaan, baik berupa hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diantaranya berupa hasil pemeriksaan investigatif.

“Namun demikian, kami juga meminta kepada Pimpinan BPK untuk memperhatikan dan mempertimbangkan serta mensosialisasikan hal-hal penting yang menjadi arah dan kebijakan pemeriksaannya kepada DPR, serta memperhatikan juga masukan dari DPR. Karena, hasil pemeriksaan BPK adalah kepada Lembaga Perwakilan, dalam hal ini adalah DPR sebagai pengguna utama hasil pemeriksaan BPK,” urai Novanto.

Selanjutnya, tambah Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur I, pihaknya meminta kepada BPK untuk dapat berperan lebih optimal dengan menggunakan seluruh kewenangan konstitu-



Ketua DPR RI Setya Novanto

sionalnya sehingga hasil pemeriksaan yang disampaikan menjadi lebih tajam dengan informasi-informasi yang akurat dan dengan tingkat validitas tinggi serta lebih komprehensif.

“Hal ini akan sangat membantu DPR dan juga DPRD dalam meningkatkan kualitas pengawasan penyelesaian pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan kinerja BPK dapat lebih optimal, tambah Novanto, BPK dapat didukung dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan berpihak kepada prinsip pemeriksaan. Apalagi, BPK masih terikat dari sisi anggaran dan organisasi dengan pemerintah, sehingga belum sepenuhnya independen dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan.

“Kami menyimpulkan, BPK akan semakin bermanfaat dalam menjalankan fungsinya dengan efektif jika didukung perangkat peraturan yang lebih memadai. Untuk itu, kami mendukung jika Pimpinan BPK mengajukan usulan untuk menyempurnakan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK,” tambahnya.

Novanto yakin, BPK telah men-

jalankan amanah konstusionalnya dengan baik dan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ia juga berharap, BPK dapat bekerja dengan independen, obyektif dan diiringi integritas yang tinggi.

Ditemui di kesempatan yang sama, Harry menyatakan pihaknya akan segera memperbaiki naskah kerjasama dengan DPR, melalui Sekjen BPK dan Sekjen DPR, agar tercipta koneksi antara fungsi pengawasan DPR dengan fungsi pemeriksaan BPK, sehingga kualitas penyelenggaraan keuangan negara dapat lebih baik ke depannya.

Terkait dengan dukungan DPR untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait dengan kinerja BPK, Harry menyambut baik hal tersebut. Pihaknya juga siap jika dimintai masukan mengenai perbaikan sistem peraturan perundang-undangan.

“Kami juga memikirkan bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan kepada kelembagaan BPK ke depannya. Kami senang jika BPK diberikan kesempatan untuk memberi masukan dalam rangka perbaikan sistem perundang-undangan yang ada. Kami sambut baik inisiatif Ketua DPR itu,” tambah Harry.

Dalam acara tersebut, hadir pula narasumber lain, diantaranya Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno, Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD Gafar Usman, Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo, dan Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Wisnu Wardhana. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr

Komisi IX DPR Terima Delegasi Kaum Muda Aksi

Komisi IX DPR menerima delegasi sekelompok anak muda berusia 15 tahun yang menamakan diri Kaum Muda Aksi 2015. Maksud dan tujuan menemui anggota Komisi IX DPR tersebut adalah dalam rangka meminta perlindungan dan arahan untuk kehidupan mendatang yang lebih baik. Dele-

gasi tersebut dipimpin Asteria Tarulisa Aritonang.

Pertemuan audensi ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri, berlangsung di ruang Rapat Komisi IX DPR Gedung Nusantara I Rabu (14/1) siang.

Syamsul Bachri menjelaskan, tugas dan wewenang Komi-



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri

si IX DPR antara lain bermitra dengan Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, BPJS, Badan POM, BKKBN, dan BNP2TKI sebagai representasi dari DPR untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi *budget* dan pengawasan.

Syamsul Bachri meminta kepada delegasi untuk menjelaskan apa-apa saja yang menjadi keinginan dan tujuan serta pandangan-pandangan yang menjadi konsen para Kaum Muda Aksi agar Komisi IX DPR dapat menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ketua Delegasi Kaum Muda Aksi As-

teria Tarulisa Aritonang mengatakan, bahwa pada tahun 2015 merupakan tahun yang menentukan sejarah. Keputusan yang akan diambil dalam dua sidang Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) akan mengubah masa depan manusia dan planet bumi kita.

Asteria mengemukakan, di bulan September 2015 serangkaian tujuan pembangunan selanjutnya akan disetujui dan akan membentuk kerangka kerja baru kemanusiaan di masa mendatang. Dibulan Desember, kesepakatan baru untuk target perubahan iklim juga akan disepakati.

“Jika dunia bangkit pada kesempatan bersejarah ini, maka kita dapat menjadi bagian penting dalam upaya pengakhiran kemiskinan. Selain itu, memberi semua orang kesempatan untuk hidup dengan bermartabat, tanpa membahayakan masa depan planet bumi yang kita diami,” kata Asteria.

Sebuah gerakan global baru, kata Asteria, telah dibentuk di seluruh dunia dengan fokus untuk mendukung perjanjian yang ambisius akan kemiskinan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan dalam ke dua sidang PBB yang

akan datang.

Kaum Muda Aksi akan juga diluncurkan secara formal, dimana puluhan ribu orang (pemimpin, selebriti, dan ratusan organisasi) diseluruh dunia, mulai dari gerakan akar rumput hingga organisasi internasional akan bergabung.

Asteria menjelaskan, bahwa koalisi Kaum Muda Aksi adalah bagian dari kampanye *global action* yang bertujuan untuk mengkampanyekan dan mempertemukan berbagai organisasi di dunia yang memiliki komitmen untuk mewujudkan kemajuan yang nyata dalam hal pengentasan kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim.

Di Indonesia tujuan utama dari Koalisi Kaum Muda Aksi adalah untuk mendorong perjanjian pada fokus manusia, inklusif dan keberlanjutan. Selain itu, mempertemukan beragam agenda kampanye yang sudah ada untuk menjadi gerakan yang lebih luas, mendorong akuntabilitas, dan meletakkan dasar bagi gerakan masyarakat sipil di masa depan. (Spy). foto: iwan armanias/parle/hr

DPR Harapkan Rekam Jejak Yang Lebih Luas Dubes Yang akan Ditempatkan di Indonesia

Pimpinan Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I yang digelar Rabu (14/1) di Ruang Rapat Pimpinan DPR Lantai III Gedung Nusantara III, membahas nama-nama calon dubes 12 negara yang akan ditempatkan di Indonesia. Rapat antara lain mengharapkan kepada Kemenlu agar lebih banyak *back ground* atau latar belakang dan rekam jejak calon Dubes.

Menurut Jazuli, dalam rapat konsultasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, secara umum DPR diminta pertimbangan terhadap calon Dubes negara-negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia, meski bisa dipakai atau tidak oleh Presiden. “Kalau melihat tanggungjawab kepada Pemerintah, peran DPR cukup besar baik di bidang politik, keamanan atau sosial serta bidang lainnya. Karena itu Pimpinan Fraksi-fraksi dan Komisi I menginginkan agar ada rekam jejak

calon dubes itu lebih luas dan lebih dalam,” kata Jazuli.

Selama ini lanjut dia, DPR hanya diberi kesempatan singkat sekitar 30 menit sehingga tidak bisa memberikan pertimbangan yang komprehensif. Meski juga ada pertimbangan dari instansi lain termasuk BIN, tetapi Kemenlu harus juga membuat penjelasan lebih luas, karena kita juga ingin tahu pandangan mereka seperti apa tentang Indonesia. Kalau menyangkut kerja sama bagaimana, atau pengembangan kerja bidang lainnya.

“Dubes adalah jembatan antara dua negara, sehingga kita harapkan para Dubes bisa sebagai jembatan bukan yang rapuh tetapi jembatan yang kokoh. Seorang Dubes yang memahami untuk saling membangun kerja sama dua negara. Jangan membangun satu tempat tetapi menginjak tempat lain,” tegas politisi PKS ini.

Ditambahkan, Dewan ingin ada komunikasi yang baik, di era keterbukaan sekarang ini harus dibangun



Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini

kerja sama yang positif bukan campuran masalah dalam negeri masing-masing. “Intinya kami ingin semua calon Dubes negara sahabat, tidak hanya dengan calon Dubes Australia juga diambil sikap sama. Karena ke depan kita inginkan hubungan yang lebih baik, mesra dan memberi manfaat kedua pihak dan tidak ada intervensi satu negara dengan negara lainnya,” ungkap Jazuli menambahkan. (mp) foto: iwan armanias/parle/hr

DPR Ingin Calon Kapolri Clean and Clear

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menginginkan Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) *clear and Clean*. “Kita ingin juga agar kedepan calon Kapolri *clear and clean* sehingga tidak ada halangan untuk melanjutkan tugas-tugas dan agenda reformasi di kepolisian,” disela-sela *fit and proper test* Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Rabu (14/1), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Nasir Djamil, terhadap Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan akan diputuskan juga hari ini. Bahwa kemudian kalau ada fraksi-fraksi yang barangkali tidak setuju bisa menyatakan keberatannya kepada rapat pleno Komisi III, dan itu bisa disampaikan juga pada sidang Paripurna.

Tapi kalau memang ada kemungkinan untuk pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak bisa disepakati, mungkin ada fraksi-fraksi yang tidak setuju. “Bisa saja mekanisme *votting* dilakukan di Komisi III untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap Calon Kapolri ini,” katanya.

Selain itu, Nasir menjelaskan, klarifikasi yang telah dilakukan oleh Komisi III juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *fit and proper test*. “Apa yang menjadi isu



Calon Kapolri Komjen. Pol. Budi Gunawan saat *fit and proper test*

atau apa yang menjadi fenomena hukum terhadap Komjen Pol Budi Gunawan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi fraksi-fraksi untuk menilai apakah yang bersangkutan layak dan patut untuk menjadi Kapolri,” tegasnya. (as) foto: [naefurodjie/parle/hr](#)

Komisi V Desak KNKT Segera Tuntaskan Investigasi Kecelakaan Air Asia



Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido

Komisi V DPR RI mendesak kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera menuntaskan investigasi terhadap kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501. “Kita (Komisi V) meminta kepada KNKT nantinya untuk transparan terhadap investigasi, supaya dari hasil KNKT nantinya bisa memperbaiki dunia penerbangan Indonesia,” kata Anggota Komisi V Rendy Lamadjido.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, guna membicarakan Perkembangan Penanganan Kecelakaan Pesawat AirAsia QZ 8501 pada tanggal 28 Desember 2014. Rapat tersebut, dihadiri Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Utama

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), Direktur Utama PT.Angkasa Pura I, Ketua Indonesia Slot Coordinator (IDSC), dan Direktur Utama PT.Indonesia AirAsia, Selasa (13/1), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Rendy menyampaikan pembicaraan persoalan ini belum terlalu tuntas, karena masih membahas persoalan-persoalan kesalahan prosedur yang dialami oleh AirAsia. Dia menjelaskan pembicaraan mulai dari pernyataan dari BMKG bahwa tidak diambilnya format dokumen *flight* yang seharusnya diambil oleh setiap maskapai penerbangan sebelum berangkat, sampai dengan persoalan-persoalan tidak terlayannya dari persoalan administrasi yang membuka jalur Surabaya-Singapura.

Dia berharap fokus pada persoalan bagaimana mengurangi rugi para penumpang dan juga bagaimana menjadikan penerbangan Indonesia lebih baik. “Kita akan tuntaskan nantinya saat kehadiran Menteri Perhubungan pada Rapat Kerja di Komisi V,” tegasnya.

Rendy mensinyalir ada kesalahan prosedur, mulai dari persoalan tidak beresnya izin. Oleh karena itu, Pemerintah didesak untuk lebih ketat melakukan pengawasan. “Regulasi penerbangan Indonesia sudah baik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan sudah sangat akurat mengawasi persoalan-persoalan itu.

Tinggal sekarang penegakan hukumnya, sekarang Pemerintah harus ketat mengawasi maskapai-maskapai penerbangan termasuk masalah Sumber Daya Manusianya,” ungkap Rendy dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (as) foto : [riska arinindya/parle/hr](#).

Komisi IX Terima Jaringan Advokasi PRT

Komisi IX DPR RI, Selasa (13/1/2015) menerima Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan Komite Aksi Perlindungan PRT dan Buruh Migran (KAPPRTBM). Jala PRT dipimpin Lita menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait RUU Perlindungan Rumah Tangga (RUU PPRT) dan menuntun Komisi IX segera menyelesaikan RUU tersebut dan meratifikasi Konvensi ILO 189.

Ketua Komisi IX, Dede Yusuf Macan Efendi memberikan apresiasi kepada Jala PRT dan KAPPRTBM atas masukannya terkait RUU PPRT. Dede menyampaikan bahwa RUU PPRT telah disepakati menjadi salah satu RUU Prioritas Komisi IX Tahun 2015.

Diinformasikan Dede, bahwa Komisi IX telah menetapkan 3 (tiga) RUU Prioritas Tahun 2015 yaitu RUU Kebidanan, RUU PPRT dan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

“Kami sangat *concern* terhadap RUU ini, dan kami telah meminta Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI untuk membantu menyiapkan penyusunan draft dan naskah akademik ketiga RUU tersebut,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, Komisi IX sejalan dengan harapan Jala PRT dan KAPPRTBM untuk menyelesaikan RUU PPRT ini dan mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan Jala PRT.

“Bagaimanapun ini menyangkut hak-hak insan-insan bangsa kita. Ini tidak bicara mengenai PRT, bukan bicara



Ketua Komisi IX, Dede Yusuf Macan Efendi saat menerima Jaringan Advokasi PRT

tentang buruh tapi berbicara tentang insan bangsa Indonesia yang memiliki hak yang sama,” jelas Dede.

Sementara Anggota Komisi IX yang turut hadir, Ribka Tjip-taning mengusulkan agar Jala PRT dan KAPPRTBM untuk melakukan advokasi kepada seluruh *stakeholder* termasuk fraksi-fraksi di DPR terkait penyelesaian RUU tentang PPRT menjadi UU.

Menurut Ning, demikian sapaan akrabnya, sering terjadi pendapat Anggota DPR di Komisi berbeda dengan sikap fraksinya. (sc) foto: naefurodje/parle/hr

Komisi III DPR Sambangi Kediaman Budi Gunawan



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin didampingi Anggota Komisi III saat mengunjungi kediaman Calon Kapolri

Komisi III akan tetap melaksanakan proses *fit and proper test* (uji kepatu-
tan dan kelayakan) terhadap calon
Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan.

Walaupun diketahui, Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transaksi mencurigakan.

Sebagai rangkaian dari *fit and proper test*, Komisi Hukum DPR ini pun menyambangi kediaman Budi Gunawan pada Selasa (12/01/15) sore. Hujan rintik dan serbuan awak media menyambut kedatangan Komisi III di rumah yang beralamat di Jalan Duren III Barat VI No 21, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ini.

“(Kunjungan) Ini merupakan rangkaian dari *fit and proper test*. Yang mana, rangkaian ini berdasarkan Surat Presiden tertanggal 9 Januari 2015. Surat dari Presiden ini juga sudah melalui mekanisme Paripurna, dan juga sudah dibawa ke Badan Musyawarah, dan diputuskan Komisi III menindaklanjuti masalah ini melalui mekanisme dan tata tertib,” jelas Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, dalam keterangan

persnya, usai pertemuan tertutup.

Untuk itu, tambah Politisi Golkar ini, pihaknya menindaklanjuti keputusan itu dengan membahasnya dalam rapat Pleno Komisi III. Dalam rapat pleno yang dilaksanakan secara tertutup sebelum kunjungan, 2 fraksi memberikan catatan terkait proses *fit and proper test*.

“Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan untuk tidak melanjutkan proses ini. Fraksi PPP memberikan catatan dapat melanjutkan proses, namun harus mendapat konfirmasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil pleno itu, kemudian 8 fraksi memutuskan untuk tetap melanjutkan prosesnya,” tambah Politisi asal Dapil

Lampung II ini.

Ia menambahkan, Komisi III akan melakukan *fit and proper test* terhadap Budi Gunawan pada Rabu (14/01/15), pukul 09.00 pagi. Kunjungan ke kediaman mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ini diikuti oleh 27 Anggota Komisi III DPR. (sf), foto : andri/parle/hr.

Delegasi DPR Pada Sidang APPF Dukung Intensifikasi Pajak

Dalam menghadapi agenda pembangunan pasca 2015, delegasi Indonesia mendukung ekstensifikasi pajak dan mobilisasi sumber daya alam daerah sebagai nilai tambah dalam pembangunan sektor keuangan bagi negara.

“Sejak 2002, Indonesia telah memiliki pengalaman desentralisasi pada sektor keuangan negara,” kata anggota delegasi Parlemen Indonesia Wiryanti Sukamdani saat menyampaikan pidato *statement* Indonesia mengenai situasi ekonomi regional dan internasional, dengan tema tantangan keuangan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan : struktur keuangan dunia baru, Selasa, (13/1) di Quito, Ekuador.

Menurut Wiryanti, desentralisasi membuka berbagai kemungkinan mobilisasi pengembangan sumber daya ekonomi di daerah sebagai salah satu sumber alternatif pembangunan ekonomi.

“Berdasarkan UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 34 tahun 2000 selain transfer dana alokasi daerah, pemerintah setempat juga dapat meningkatkan pendapatannya dari berbagai sumber



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang APPF Ekuador

seperti pajak daerah, Pajak Bumi dan bangunan, dan juga sumber dana lain, sejak tahun 2010 pemerintah daerah dapat meningkatkan pajak bangunan,”paparnya.

Dia menambahkan, dalam melakukan mobilisasi sumber daya daerah, kerjasama antara swasta dan peme-

rintah (*Public Private Partnership*) memainkan peran penting di Indonesia. “Dengan cara ini dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan dan ekspansi pembangunan di Indonesia melalui program MP3EI,” jelasnya. (sugeng) foto: dok/parle/hr

DPR Desak APPF Bersatu Tangani Kejahatan Transnasional

Delegasi Indonesia mendesak Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) bersatu untuk mengurangi perbedaan menangani kejahatan transnasional yang terorganisir seperti narkoba, perdagangan manusia, imigran gelap, terorisme dan kejahatan lingkungan

seperti *illegal logging* dan perdagangan hewan langka.

“Diperlukan langkah integrasi, koordinasi, dan langkah yang efektif untuk menangani masalah tersebut,” ujar delegasi Indonesia Teguh Juwarno saat menyampaikan *statement* Indonesia



Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno saat menyampaikan *statement* Indonesia di Sidang APPF

terkait situasi regional dan internasional : politik dan keamanan sebagai kebijakan alternatif dan pendekatan baru untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir dan terorisme, pada sidang APPF di Quito, Ekuador, Senin sore, (12/1).

Delegasi Indonesia menyoroti isu terorisme yang harus dicermati seperti kehadiran *Islamic State Irak dan Siria* (ISIS). Pada kesempatan itu,

Teguh mengatakan, terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya menjadi salah satu perlawanan terhadap perdamaian dan keamanan dunia serta membawa dampak serius terhadap komunitas internasional dan pembangunan sosial dan ekonomi. “Saya tekankan disini terorisme tidak terkait agama tertentu, negara, penduduk atau etnis tertentu,” tegasnya.

Menurutnya, yang harus diwaspadai yaitu pertumbuhan grup terorisme

atau sel terorisme melalui perekrutan anggota baru. “Karena itu kita harus saling berkordinasi dan melakukan langkah aksi global dalam memerangi penyebaran sel terorisme,” jelasnya.

Dia menambahkan, kerjasama menjadi kunci untuk menghentikan aktivitas terorisme. “Kerjasama antara anggota parlemen APPF dan organisasi regional serta internasional sangat diperlukan. (Sugeng). foto: dok/parle/hr

Ketua DPR Terima Menlu Timor Leste

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Timor Leste Joes Luis Guterres di ruang kerjanya. Kunjungan ini tentu untuk semakin mempererat hubungan kedua negara yang dulu sempat memiliki sejarah bersama.

Dengan gaya yang sangat bersahabat, Menlu Timor Leste menyampaikan kondisi terakhir di negaranya. Ia ingin Indonesia tetap dapat membangun kerja sama yang baik dengan Timor Leste di bidang perdagangan, investasi, kebudayaan, dan sosial. Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPR saat menerima Guterres di ruang kerjanya, Selasa (13/1). Menurutnya, pembangunan di Timor Leste sangat pesat dan itu perlu diapresiasi.

Novanto juga menyampaikan bahwa ketika Timor Leste masih menyatu dengan Indonesia, dirinya pernah menjadi wakil rakyat dari dapil Timor Timur. Ini semakin meningkatkan hubungan emosional dengan rakyat Timor Leste. Baik Guterres maupun Novanto, sepakat kerja sama kedua negara perlu ditingkatkan dengan membangun infrastruktur penghubung yang selama ini dirasa masih kurang.

Di Indonesia sendiri, kata Novanto, pertumbuhan eko-



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima kunjungan kehormatan Menlu Timor Leste Joes Luis Guterres

nominya sangat baik. Bahkan, penerimaan pajaknya sudah luar biasa. “Sekarang perhatian pemerintah Indonesia pada pembangunan Infrastruktur terutama yang ada di daerah,” kata Novanto kepada Guterres. Novanto juga berharap, sebagai Menlu, Guterres bisa terus menjembatani hubungan yang konstruktif antara Indonesia-Timor Leste. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

Komisi XI Segera Bahas RAPBN-P Dengan Pemerintah

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 sudah dimulai. Banyak tugas sudah menanti untuk dikerjakan oleh seluruh Anggota DPR. Tak terkecuali Komisi XI. Komisi yang membidangi ekonomi dan perbankan ini pun sudah mengatur jadwal rapat kerja dengan mitra kerjanya.

Demikian dikatakan Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, ketika ditemui sesaat sebelum Rapat Paripurna, Senin (12/01/15). Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Bambang Permedi Soematri Brodjonegoro untuk segera rapat kerja membahas

Rancangan APBN Perubahan 2015 (RAPBN-P 2015).

“Saya akan atur waktu dengan Menteri Keuangan untuk selesaikan masalah (RAPBN-P 2015) itu. RAPBN-P harus cepat selesai karena mendesak,” jelas Fadel.

Selain itu, tambah Politisi Partai Golkar ini, Komisi XI juga akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kebijakan makro keuangan dan perbankan melalui BI dan OJK. Penyelesaian masalah itu melalui perbaikan pada Undang-undang yang ada.



Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad

“Untuk itu kita sudah atur untuk bertemu dengan BI, Insya Allah hari Rabu (14/1) besok,” imbuhnya.

Terkait dengan perencanaan nasional, Politisi asal Dapil Gorontalo ini menambahkan, Komisi XI akan segera mengatur rapat kerja dengan Bappe-

nas. Walaupun sampai saat ini belum ada kepastian dari Bappenas.

“Padahal Bappenas ini sangat penting untuk mengatur semua anggaran yang ada, yang berhubungan dengan baik buruknya APBN Perubahan 2015,” tambahnya.

Sedangkan, untuk program legislasi, Fadel menyatakan pihaknya akan menyusun RUU yang berkaitan dengan Perbankan. Pasalnya, UU Perbankan ini dianggap terlalu liberal, sehingga perlu ditata kembali. (sf)/foto: iwan armanias/parle/hr.

Banggar DPR Segera Terbentuk dan Bahas APBN-P

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengungkapkan bahwa badan anggaran (Banggar) DPR RI akan segera terbentuk. Pasalnya nama-nama anggota Banggar sudah masuk ke meja pimpinan DPR. Hal tersebut diungkapkannya kepada Wartawan, Senin (12/1) di loby gedung Nusantara I Senayan, Jakarta.

“Jadi Banggar ini sudah terbentuk, nama-nama dari masing-masing fraksi sudah masuk, tinggal menetapkan pimpinan Banggar saja,” ungkap Agus.

Dijelaskannya, pembentukan Banggar memang berbeda dengan Komisi-komisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Saat ini Banggar DPR RI sangat diperlukan karena DPR sudah harus

melakukan pembahasan APBNP (anggaran pendapatan belanja negara-perubahan) oleh pemerintah. Jika APBNP belum dibahas maka pemerintah juga tidak akan bisa segera bekerja.

Hal itu menurut Agus terkait adanya nomenklatur Kementerian yang berubah, sebut saja Kementerian lingkungan hidup dan Kementerian Kehutanan yang digabung menjadi satu Kementerian. Namun bukan lantas anggaran dua kementerian tersebut digabung menjadi satu.

“Kementrian lingkungan hidup dan kementrian kehutanan dilebur jadi satu, dengan begitu bukan berarti anggaran kementrian kehutanan dan kementrian lingkung hidup digabung



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

juga jadi satu. Terlebih lagi pemerintah di dalam visinya ingin memperkuat infrastruktur di sektor produktif yang mengubah anggaran dari 190 Triliun ke 290 Triliun. Perbedaan 100 triliun ini kan tidak sedikit. Perubahan itu harus kita bahas lewat Banggar setelah sebelumnya melalui komisi masing-masing,” papar Politisi dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Jawa Tengah I ini. (Ayu), foto : naefurodjie/parle/hr.

Pembukaan Pameran Foto Reses F-PKB



Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Ketua Fraksi PKB Helmy Faizal Zaini saat membuka Pameran Foto Reses

Masa reses merupakan saatnya wakil rakyat kembali ke masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, usai masa resesnya anggota DPR harus memberi laporan terkait aktivitasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Khusus untuk anggota Fraksi PKB semua kegiatan itu wajib diabadikan dalam bentuk foto-foto yang kemudian dipamerkan selama lima hari di Lobi Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKB Helmy Faizal Zaini saat sambutan pembukaan pameran foto bertajuk Aku Dekat, Engkau Dekat, Senin (12/1).

“Ini merupakan pertama kalinya sebuah partai merangkul seluruh kegiatan selama reses di dapilnya masing-masing. Foto-foto ini menunjukkan bahwa reses tidak semudah

yang kita bayangkan, ada yang sampai menyusuri sungai dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk komitmen anggota DPR sebagai wakil rakyat dalam mempergunakan masa resesnya,” papar Helmy.

Dalam kesempatan itu anggota DPR RI Komisi I yang sekaligus sebagai Ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar mengapresiasi gagasan pembuatan kegiatan pameran foto tersebut.

Disela-sela sambutannya pria yang akrab disapa Cak Imin ini bahkan menceritakan guyonan bahwa ada beberapa rekan separtainya yang lupa mengabadikan kegiatannya saat reses itu yang akhirnya harus kembali lagi ke dapilnya hanya untuk memotretnya.

“Karena ada kewajiban di fraksi PKB untuk menyampaikan laporan selama reses dalam bentuk foto, ada yang lupa memoto dan akhirnya harus

kembali lagi ke Dapilnya itu hanya untuk memotret,” ujar Cak Imin sambil tertawa.

Usai membuka pameran foto FPKB tersebut, Cak Imin berkeliling untuk melihat satu per satu foto yang dipamerkan, dilanjutkan dengan peresmian TV PKB yang akan ditayangkan secara streaming melalui website resmi PKB. (Ayu) foto: rizka/parle/hr.

Komisi I Akan Lanjutkan Bahas RUU Penyiaran Publik



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran Publik hingga saat ini belum dapat diselesaikan, maka dalam masa sidang II tahun 2014/2015 RUU tersebut menjadi perhatian khusus bagi Komisi I DPR. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, sebelum rapat paripurna pembukaan sidang yang diselenggarakan di Gedung DPR Gedung Nusantara II Senin (12/1) pagi.

Tantowi Yahya menambahkan, seperti halnya Komisi-Komisi yang lain ada beberapa Rancangan Undang-Undang yang akan diselesaikan, sementara Komisi I DPR akan merevisi beberapa RUU yaitu RUU Telekomunikasi, RUU IT dan RUU Penyiaran.

Ketiga RUU ini akan dibahas secara bersama-sama dengan instansi terkait, kemudian juga masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh anggota periode lalu yaitu revisi RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RUU-RTRI).

“Inilah hal-hal utama yang akan dibahas di Komisi I dalam konteks legislasi, RUU Penyiaran Publik ini adalah termasuk Undang-Undang baru, karena belum pernah ada sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Tantowi Yahya juga meminta perhatian agar dalam pemberian persetujuan kepada calon Duta-Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia jangan terlalu mudah.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pemberian persetujuan atau *agreement* di negara-negara lain dilakukan oleh pemerintah melalui proses yang sangat sulit. Tidak mudah bagi negara untuk menerima calon duta-duta besar untuk negara mereka” tegasnya.

Dalam observasinya selama lima tahun, proses pemberian persetujuan kepada calon-calon duta besar negara sahabat berlangsung sangat mudah. Pasalnya, forum komunikasi yang diwakili oleh perwakilan Fraksi-fraksi tidak memberikan pengetahuan dan penekanan yang cukup.

Oleh karena ini mohon kepada perwakilan dari Fraksi-Fraksi selain aktif hadir dalam rapat komunikasi juga harus memberikan pekerjaan rumah terkait dengan calon-calon duta besar tersebut, jangan asal menyetujui sebagaimana yang kita praktekkan pada periode sebelumnya.

“*Agreement* adalah sesuatu yang sangat strategis dan ini sangat penting maka seharusnya tidak mudah diberikan begitu saja. Karena itu, para perwakilan fraksi hendaknya betul-betul orang memahami dan menguasai masalah seperti ini,” tegas Tantowi. (Spy)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Dewan Segera Susun Rencana Strategis 2015-2019

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, DPR

dituntut untuk melakukan reformasi dan penguatan kelembagaan.

“Maka DPR akan segera menyusun Rencana Strategis atau Renstra DPR RI 2015-2019. Dokumen perencanaan

strategis ini akan menjadi pedoman bagi DPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang II



Ketua DPR RI Setya Novanto

DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1/2015)

Dijelaskan Setya Novanto bahwa Renstra akan memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan DPR selama lima tahun. Di samping itu,

Renstra juga memberikan gambaran perencanaan kegiatan DPR jangka pendek dan jangka menengah yang didukung dengan anggaran untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Renstra akan

memuat agenda strategis yang perlu dilakukan DPR guna mewujudkan reformasi DPR RI.

“Untuk percepatan sesuai tuntutan Undang-Undang MD3 tersebut, maka Pimpinan DPR akan segera membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR yang akan bertugas melakukan percepatan sistem reformasi menuju parlemen modern,” ujarnya.

Selain Renstra, kata politisi Partai Golkar ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, DPR akan menyusun Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Tahun 2016 untuk menjadi acuan penyusunan anggaran DPR tahun tersebut. Dan DPR juga akan melanjutkan Pembahasan Evaluasi dan Penyempurnaan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD.(sc)/foto:iwan armanias/parle/hr

DPR Banyak Mendapat Evaluasi Dari Publik

Masa Sidang Pertama yang lalu, Pimpinan DPR mendapat banyak evaluasi dari publik. Peran dan kontribusi DPR dalam melaksanakan *checks and balances* dinilai masih sangat minim.

“Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat banyak, belum dapat dikritisi oleh DPR secara kelembagaan,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidato Pembukaan Masa Sidang II di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).

Kebijakan Pemerintah tersebut, diantaranya perubahan nomenklatur kabinet, penerbitan Kartu Pintar, Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, kebijakan menaikkan harga BBM Bersubsidi, perubahan sistem penetapan harga BBM Bersubsidi, kenaikan harga elpiji 12 kilogram, dan berbagai kebijakan lain yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Terkait hal tersebut, Setya Novanto menegaskan pada Masa Sidang II ini, DPR akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi-komisi DPR RI dengan mitra kerjanya, maupun Rapat Dengar Pendapat Umum untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

Ia menegaskan, khusus terkait dengan pengalihan subsidi BBM, DPR melalui Komisi-Komisi dan Anggotanya, harus meningkatkan daya kritis dan kontrol kepada Pemerintah agar janji Pemerintah yang mengalihkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat produktif dan untuk kepentingan peningkatan standar kehidupan masyarakat kecil, benar-benar terlaksana secara konsisten.



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang II

Sementara terkait pengangkatan pejabat publik, politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pada Masa Sidang I lalu, DPR melalui Komisi III telah melakukan *fit and proper test* terhadap calon Pimpinan KPK untuk mengisi salah satu jabatan Pimpinan KPK, dan akan ditindaklanjuti dalam Masa Sidang II ini.

Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut Setya Novanto menginformasikan bahwa DPR juga akan segera memberikan pertimbangan terhadap penempatan 12 (dua belas) calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia.

“Sementara itu dalam rangka melaksanakan peran diplomasi antar-parlemen, dapat kami sampaikan bahwa

Delegasi DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, saat ini sedang menghadiri Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum atau APPF ke-23 di Quito, Ekuador,” ujarnya.

Delegasi DPR juga, lanjut Setya Novanto, direncanakan akan menghadiri Konferensi ke-10 Uni Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau PUIC

yang diselenggarakan di Istanbul, Turki dalam waktu dekat, dan Sidang Tahunan Konferensi Parlemen tentang WTO yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, bulan Februari 2015. Di samping itu, DPR akan menerima kunjungan delegasi parlemen Madagaskar dan delegasi Majelis Syuro Arab Saudi yang akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Januari ini. (sc)/foto:iwan armanias/parle/hr

Ferry Kase Gantikan Saleh Husin

Pelantikan Anggota DPR Pengganti Antar Waktu menjadi salah satu agenda dalam Rapat Paripurna, Senin (12/01/15). Sedikit berbeda, dimana sebelumnya pelantikan Anggota PAW dilaksanakan secara tersendiri, namun kali ini pelantikan Anggota PAW masuk dalam agenda Rapat Paripurna.

Anggota PAW yang dilantik adalah Ferry Kase dari Fraksi Partai Hanura. Politisi dari Dapil Nusa Tenggara Timur II ini menggantikan Saleh Husin (F-Hanura). Sebagaimana diketahui, Saleh Husin telah dipilih Presiden untuk menjabat Menteri Perindustrian.

Pelantikan dimulai dari pembacaan kutipan keputusan Presiden, dilanjutkan pengambilan sumpah yang dibacakan oleh Ketua DPR Setya Novanto



Pelantikan Anggota DPR PAW dari Fraksi Hanura, Ferry Kase

dan diikuti oleh Ferry. Kemudian, ucapan selamat dari seluruh pimpinan penandatanganan berita acara dan DPR. (sf)/foto:iwan armanias/parle/hr

Tempat Wisata Harus Ciptakan Rasa Aman dan Nyaman

Anggota Komisi X DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyayangkan terjadinya peristiwa robohnya salah satu batang pohon di tempat wisata Kebun Raya Bogor yang menewaskan empat orang dan melukai puluhan pengunjung lainnya. Hal tersebut diungkapkan Politisi dari Fraksi PAN ini sesaat sebelum berlangsungnya Sidang Paripurna, Senin (12/1).

“Tempat wisata atau tempat rekreasi yang berkaitan dengan banyak orang seharusnya bisa menciptakan rasa aman dan nyaman. Ini kecerobohan, bukan disebabkan karena peristiwa alam, yang sebenarnya bisa dihindari jika pemeliharannya dilaksanakan sesuai SOP (Standard Operational Procedure),” ungkap Eko.

Ditambahkan Eko, seharusnya pihak Kebun Raya Bogor mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut, terlebih lagi di Bogor sendiri sejatinya merupakan daerah yang didominasi oleh



Anggota Komisi X DPR Eko Hendro Purnomo

wisata alam. Dimana banyak kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan. Sehingga jika ada pohon yang kondisinya sudah rapuh atau rusak dapat langsung ditangani dengan baik, sehingga tidak sampai menimbulkan banyak korban.

“Ini jelas kesalahan pihak manajemen Kebun Raya Bogor. Kalau alasan

pengiriman menurut saya jangan pernah melakukan pengiriman untuk sesuatu yang berkaitan dengan safety atau keselamatan. Dan untuk semua pemeliharaan itu pastinya ada anggaran, baik dari APBD maupun anggaran yang berasal dari hasil penjualan tiket pengunjung. Dengan demikian alasan pengiriman untuk peristiwa ini jelas tidak dapat dibenarkan,” paparnya.

Meski demikian politisi yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat ini mengapresiasi langkah manajemen Kebun Raya Bogor yang mengakui kelalaiannya tersebut, dan kemudian bertanggungjawab atas kejadian itu. Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak terutama pihak pengelola tempat wisata agar tetap mengutamakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Lebih lanjut Eko berharap peristiwa sejenis tidak terjadi lagi. (Ayu), foto : zulfikar/parle/hr.

Blokir Anggaran DPR Harus Dicabut



Ketua BURT DPR Roem Kono

Dalam pertemuan Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR, terungkap, ada anggaran DPR sebesar Rp 783 miliar yang masih diblokir Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut harus segera dicabut, karena mengganggu kinerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR.

Demikian dikemukakan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono, (F-PG) sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Senin (12/1). Pertemuan pada Jumat (9/1) lalu itu, Menkeu Bambang Brodjonegoro me-

nyampaikan Dipa kepada Pimpinan DPR. Selain Pimpinan DPR, hadir pula dalam pertemuan tersebut Pimpinan Komisi XI dan Pimpinan BURT.

“Saya bilang kalau diblokir berarti sama saja mengurangi peranan DPR dan mengurangi kinerja DPR. saya minta kepada Menteri Keuangan untuk dicabut, karena itu untuk kepentingan peningkatan kinerja anggota dan Kesekjenan DPR,” ungkapnya. Ditanya soal argumen Kemenkeu memblokir anggaran tersebut, Roem menjawab, tidak jelas betul argumennya. Menurutnya, itu hanya persoalan teknis saja.

Sementara mengomentari penambahan anggaran Rp 100 triliun untuk infrastruktur, politisi Golkar ini, menyambut baik. Seperti diketahui, kementerian yang mendapat tambahan anggaran besar, yaitu Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Dua kementerian untuk membangun kebutuhan infrastruktur di daerah. Dan satu kementerian untuk membangun kedaulatan pangan.

“Saya kira tepat sekali. Itu sudah merupakan keinginan DPR sejak dulu. Anggaran infrastruktur ini kurang. Dengan pengurangan subsidi BBM ini, kita harapkan pemerintah lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur. Tapi pembangunan infrastruktur ini adalah masalah pemerataan. Tidak bisa berfokus pada proyek raksasa saja dan mercusuar, tetapi proyek-proyek yang menyentuh rakyat kecil juga perlu diperhatikan.

Penambahan anggaran infrastruktur ini sekaligus, lanjut Roem, untuk menstimulasi stimulus pembangunan di daerah. Ini penting untuk kemajuan daerah. (mh)/foto: iwan armanias/parle/hr.

Perlu Pembenahan Berbagai Aspek Transportasi Udara

Pimpinan DPR berpandangan perlunya dilakukan pembenahan berbagai aspek melalui regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap transportasi udara, apalagi transportasi udara yang mengalami peningkatan rata-rata sekitar 15 persen per tahun.

Demikian ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto ketika membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan II tahun 2014/2015 Senin (12/1)

Menurut Pimpinan Dewan dari FPG ini, pembenahan tersebut baik oleh pemerintah maupun oleh operator sendiri, untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara.

Terkait dengan kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501, Ketua DPR menyatakan, menjadi keprihatinan dan



Suasana Rapat Paripurna DPR RI

duka kita bersama. “DPR menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah pesawat Air Asia tersebut. Semoga keluarga serta kerabat korban yang ditinggalkan, diberikan kesabaran dan ketabahan,” ungkapnya.

Begitu juga atas musibah tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara, Pimpinan DPR telah melakukan kunjungan langsung yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra ke lokasi bencana. Di sisi lain, gunung berapi di beberapa daerah di Indonesia masih memperlihatkan aktivitasnya, seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Atas berbagai peristiwa bencana yang terjadi, DPR memandang bahwa sistem mitigasi bencana masih sangat lemah untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber potensi

bencana alam. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh dan komprehensif atas sistem mitigasi dan penanganan bencana yang terus mengancam kehidupan masyarakat.

Pada acara ini DPR juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah dan Tim SAR Gabungan di bawah koordinasi Basarnas, dan juga kepada relawan serta masyarakat nelayan, atas upayanya yang tak kenal lelah dalam pencarian pesawat dan pengevakasian para korban. DPR juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada negara-negara sahabat yang ikut membantu. (mp)/foto: andri/parle/hr.

Tidak Ada Pemerintahan Baik Tanpa Lembaga Pengawas Kuat

Ketua DPR Setya Novanto menekankan, masyarakat Indonesia menunggu apa yang akan dilakukan DPR pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2014–2015 ini. Maka dari itu, Pimpinan DPR mengajak seluruh Anggota DPR pada Masa Sidang II ini, untuk secara sungguh-sungguh menjalankan tugas konstitusional dalam kerangka *checks and balances*.

“Kita satukan hati dan rasa membangun kolektivisme kerja untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas kerja-kerja Pemerintah. Karena sesungguhnya tidak ada pemerintahan yang baik tanpa adanya lembaga pengawas yang kuat sebagai representasi daulat kuasa rakyat,” demikian ditegaskan Ketua DPR saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan II tahun 2014/2015 di depan Sidang Paripurna, Senin (12/1). Dalam rapat paripurna pertama awal tahun 2015, dihadiri 408 orang anggota dari jumlah seluruh Anggota DPR-RI 555 orang anggota.

Untuk itu, sambung Ketua DPR, di bidang legislasi, DPR pada Masa Sidang II ini akan segera menyusun Program Legislasi Nasional atau Prolegnas yang merupakan daftar Rancangan Undang-Undang atau RUU sebagai acuan pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama lima tahun ke depan. Pimpinan DPR mengharapkan baik DPR maupun Pemerintah, dapat mengajukan daftar RUU yang sangat mendesak untuk dibentuk dan dibahas serta mempunyai nilai kepentingan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Menjadi penting untuk diperhatikan, kata Setya Novanto, Prolegnas ini harus realistis serta sesuai dengan arah hukum yang hendak diwujudkan, sehingga dapat diselesaikan bersama oleh DPR dan Pemerintah secara tepat waktu.

Berdasarkan realisasi pembentukan undang-undang yang telah dilaksanakan oleh DPR bersama dengan Pemerintah pada periode sebelumnya, jumlah RUU yang dapat diselesaikan dalam satu tahun adalah berkisar antara 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) RUU. Dengan demikian, untuk menyusun jumlah RUU yang realistis masuk dalam Prolegnas 2015–2019 adalah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) RUU. Hal ini perlu menjadi pertimbangan DPR dan Pemerintah dalam menetapkan Prolegnas.

Masih dalam konteks fungsi legislasi, DPR juga akan



Ketua DPR RI Setya Novanto

segera menyusun daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Sehingga mulai Masa Sidang ini, Komisi-Komisi dapat segera menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan RUU sesuai dengan prioritas masing-masing Komisi. Berdasarkan Undang-Undang MD3 dan ketentuan Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 184 Peraturan DPR mengenai Tata Tertib disebutkan juga bahwa setiap Anggota memiliki hak mengajukan usul RUU. Untuk itu setiap Anggota diharapkan dapat mengajukan usul RUU sesuai dengan mekanisme pengajuan RUU.

Di samping itu, DPR juga akan menggiatkan program sosialisasi undang-undang yang telah disahkan agar masyarakat memahami lebih awal setiap kebijakan yang dikeluarkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/hr.

Fathan Resmi Jadi Pimpinan Komisi VIII



Penetapan Pimpinan Komisi VIII DPR RI

Sesuai dengan UU No.27 tahun 2009 yang diamandemen menjadi UU No. 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPR dan MPR, dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan lainnya di DPR (komisi-komisi, Badan

Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan lain-lain) dimana Pimpinan Komisi tergabung dalam satu paket yang terdiri dari satu ketua, dan maksimal empat wakil ketua. Mengingat hal tersebut, maka Wakil

Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA), Fahri Hamzah, Rabu (14/1) menetapkan satu paket Pimpinan Komisi VIII DPR RI.

“Atas persetujuan dari seluruh anggota Komisi VIII maka Pimpinan DPR menetapkan Paket Pimpinan Komisi VIII yang terdiri dari Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi PAN sebagai Ketua, Deding Ishak dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS dan Fathan dari Fraksi PKB menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,” ujar Fahri.

Penetapan paket Pimpinan Komisi VIII tersebut sekaligus menandakan bergabungnya Fathan dari Fraksi PKB dengan Daerah Pemilihan Jawa Tengah II sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Selanjutnya Fahri berharap agar Pimpinan Komisi bisa terus bersinergi dengan anggota komisi lainnya serta berbagai mitra kerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat. (Ayu) foto: rizka/parle/hr

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto Tetapkan Pimpinan Komisi IV

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Komisi IV DPR RI yaitu ketua Edhi Prabowo dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua Herman Khaeron Fraksi Partai Demokrat, Titiek Soeharto dari Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua Viva Yoga dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Wakil Ketua Ibnu Multazam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pada rapat intern Komisi IV dalam rangka penetapan penambahan pimpinan Komisi IV DPR RI tersebut, Rabu (14/1) di Gedung Parlemen, Jakarta. Agus Hermanto mengatakan bahwa hal ini sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 97 Ayat (2) yaitu pimpinan komisi terdiri atas 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam 1 paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai



Penetapan Pimpinan Komisi IV DPR RI

dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua, khusus-

nya kepada pimpinan komisi IV dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” katanya. (as) foto: rizka/parle/hr

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Tetapkan Pimpinan Komisi II



Penetapan Pimpinan Komisi II DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tetapkan Pimpinan Komisi II DPR sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menjadi UU No.42 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam UU ini disebutkan, ketentuan pasal 97 mengatur bahwa pimpinan komisi terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua

yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam 1 paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai prinsip musyawarah dan mufakat.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut karena paket ini bersifat tetap maka disampaikan paket lama yang sudah ada yaitu, Ketua Rambe Kamarulzaman dari Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua Ahmad Riza Partria dari Fraksi Partai Gerindra, dan Wakil Ketua Wahidin Halim dari Fraksi Partai Demokrat, dan Wakil Ketua Mustafa Kamal dari Fraksi PKS.

Fahri melihat ada usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu untuk menjadi Wakil Ketua, sesuai dari perubahan UU MD3, Lukman Edy.

“Karena ini hanya ada 1 paket, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kita tetapkan sebagai pimpinan Komisi II DPR RI periode 2014-2019,” tegasnya, yang disetujui oleh seluruh anggota Komisi II DPR. (as) foto: rizka/parle/hr

Pimpinan DPR Tetapkan dan Sahkan Pimpinan BURT

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, untuk melanjutkan pekerjaan dalam rangka menyusun kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menjadi UU No.42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Fahri menjelaskan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada bahwa calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh fraksi-fraksi, dan calon ketua dan wakil ketua diusulkan secara tertulis oleh fraksi dalam rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. “1 paket calon pimpinan BURT yang terdiri dari 1 calon ketua dan 4 calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon Pimpinan BURT dalam rapat BURT,” jelas Fahri, Rabu (14/1), di Gedung parlemen, Jakarta.

Dalam hal hanya terdapat 1 paket calon pimpinan BURT, pimpinan rapat BURT langsung menetapkan sebagai pimpinan BURT. Ketentuan lainnya adalah ketentuan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, Fahri Hamzah sebagai pimpinan Dewan memimpin rapat ini dalam rangka pemilihan dan penetapan pimpinan BURT DPR RI masa bakti 2014-2019.

“Paket yang sudah masuk yaitu, Ketua Roem Kono dari



Penetapan Pimpinan BURT DPR RI

Fraksi Golkar, Wakil Ketua Agung Budi Santoso dari Fraksi Partai Demokrat, Wakil Ketua Novita Wijayanti dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua Dimiyati Natakusuma dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Wakil Ketua Elva Hartati dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” papar Fahri.

Seluruh fraksi menyetujui dan pimpinan Rapat mengetuk palu tanda persetujuan dan pengesahan Pimpinan BURT terdiri lima anggota dari lintas Fraksi. (as) foto: rizka/parle/hr

Belajar Tentang Nabi, Jangan Lupa Aplikasi



Suasana Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Sekretariat Jenderal DPR, MPR dan DPD kembali bersama-sama mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Agenda tahunan ini penting untuk kembali mempelajari sifat-sifat nabi dan menjadikannya suri teladan dalam meningkatkan kinerja di kesetjanaan.

“Peringatan Maulid ini kita belajar kembali dan mendalami sirah Nabi Muhammad SAW, yang harus menjadi suri teladan bagi kita. Selanjutnya ini harus diaplikasikan dalam tugas seluruh karyawan setjen dan tentu anggota dewan,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid saat

menyampaikan sambutan dalam acara di Masjid Baiturrahman, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/15).

Politisi FPKS yang juga anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan akan lebih baik lagi apabila kegiatan mendalami sirah nabi jangan hanya pada saat peringatan Maulid Nabi. Kegiatan ini perlu dilakukan berkala seperti kegiatan kajian mingguan, sehingga pemahaman dan aplikasi juga menjadi lebih baik.

Sementara Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR Satyanta Nugraha menyebut Peringatan Maulid Nabi ini juga kesempatan bagi tiga kesetjanaan untuk bekerja sama dan saling bersilaturahmi. Ia berharap acara ini dapat membangun keseimbangan ditengah tantangan pekerjaan yang terus meningkat.

“Acara Maulid Nabi ini mempersatukan Setjen MPR, DPR dan DPD, tujuannya untuk meningkatkan iman dan taqwa dan menjaga keseimbangan. Pekerjaan fisik, psikis tentu harus diikuti dengan kegiatan yang sifatnya rohani. Ini dalam rangka menjaga keseimbangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini mengusung tema, “Dengan Peringatan Maulid Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, Kita Tingkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT serta Pengabdian kepada Bangsa dan Negara”. Turut hadir sebagai penceramah KH Tohri Tohir Pimpinan Yayasan Darul Aitam. (iky) foto: naefurodij/parle/hr

Komisi II Pastikan Bahas Perppu Pilkada dan Pemda

Komisi II DPR RI dipastikan segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) no.1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perppu no.2/2014 atas perubahan terhadap UU no.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pemandangan Umum menanggapi keterangan pemerintah, sembilan fraksi menyatakan siap melanjutkan pembahasan. Sementara Fraksi Partai Gerindra masih meminta waktu satu hari sebelum menyampaikan jawaban secara resmi.

“Paling penting dalam rapat kerja kali ini kita dapat memutuskan pembahasan terhadap dua Perppu dan RUU Pilkada dapat kita selesaikan dalam masa sidang ini. Jangan dianggap sudah kiamat dunia ini, semua bisa kita selesaikan demi bangsa dan negara,” kata Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis



Pimpinan Komisi II DPR RI berjabat tangan dengan Menkumham

(15/1/14).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo penuntasan pembahasan Perppu diperlukan untuk menjawab pertanyaan banyak pihak terkait pelaksanaan Pilkada 2015. “FPDIP berharap agar usulan ini dapat respon positif dari fraksi-fraksi, DPD dan pemerintah dengan satu harapan agar tahapan penyelenggaraan Pilkada 2015 dapat segera dilaksanakan sesuai rencana,” ujar dia.

Sementara itu anggota Fraksi Golkar

Dadang S Muchtar menyampaikan informasi menarik yang patut dicatat publik. “Perppu ini dikeluarkan sesaat setelah UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditandatangani oleh presiden. Seluruh materinya dicabut padahal presiden turut mem-bahasnya bersama DPR,” kata dia.

Pemerintah dalam keterangan yang disampaikan Menkumham Yasonna H. Laoly menjelaskan penetapan RUU yang mengesahkan kedua Perppu menjadi penting sebagai jaminan terwujudnya prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945.

“Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi,” demikian Yasonna yang dalam rapat didampingi Mendagri Tjahyo Kumolo.

(iky) foto: rizka/parle/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama sejumlah Anggota DPR saat melakukan lobi disela-sela Rapat Paripurna

Persetujuan DPR Atas Budi Gunawan Diwarnai Interupsi dan Lobi

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Taufik Kurniawan Kamis (15/1) akhirnya menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri (Kapolri) menggantikan Jenderal (Pol) Sutarmanto. Persetujuan diwarnai interupsi dan lobi menyusul penolakan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN yang meminta penundaan persetujuan tersebut.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin membacakan laporan proses seleksi yang telah dilakukan setelah menerima surat dari Presiden Joko Widodo yang meminta DPR menyetujui Budi Gunawan sebagai kepala Polri dan memberhentikan Sutarmanto.

“Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, melalui pandangan

fraksi-fraksi menyetujui mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dan menyetujui memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarmanto sebagai Kepala Polri,” ujar Aziz Syamsuddin

Loby dilakukan karena usulan dua fraksi tersebut meski ditolak oleh Fraksi Nasional Demokrat yang meminta agar pengambilan keputusan langsung dilakukan berdasarkan suara mayoritas. Pimpinan Sidang Taufik Kurniawan mengusulkan adanya lobi karena menyangkut hal-hal prinsip, dan menawarkan lobi 5 sampai 10 menit.

Usai lobi yang hampir berlangsung satu jam, Taufik kembali melanjutkan sidang dan mengatakan, dalam forum

tersebut, disepakati tetap berpegang pada keputusan Komisi III DPR yang menyetujui mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri sehingga prosesnya tinggal disahkan dalam paripurna.

Ketua Sidang menawarkan, apakah dapat disetujui?” tanya Taufik kemudian disambut dengan teriakan para anggota Dewan “setujuuuu...,” ditutup dengan ketok palu tiga kali sebagai tanda pengesahan.

Dengan disetujuinya calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh DPR, selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (mp) foto: denus/parle/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima cinderamata dari Ketua BPK Harry Azhar Azis di Auditorium BPK RI, Rabu (14/1). Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr



Rapat Konsultasi Antar Pimpinan Lembaga Tinggi Negara di Istana Negara bahas Program Insfrastruktur, Rabu (14/1). Foto: Andri/Parle/Hr



Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Fahri Hamzah dengan Pimpinan Fraksi DPR RI, Selasa (13/1). Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr



Raker Komisi II dengan MenkumHAM & Mendagri terkait Perppu No.1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Perppu No.2/2014 atas perubahan terhadap UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kamis (15/1). Foto: Rizka/Parle/Hr



RDPU Komisi V DPR RI dengan Basarnas, BMKG, KNKT, LPPNPI, Angkasa Pura I, IDSC, AirAsia Indonesia, Selasa (13/01). Foto: Rizka/Parle/Hr



Raker Komisi II dengan MenkumHAM & Mendagri terkait Perppu No.1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Perppu No.2/2014 atas perubahan terhadap UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kamis (15/1). Foto: Rizka/Parle/Hr